Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi e-ISSN: 2549-4236, p-ISSN: 1411-8939
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 24, No 1 (2024): Februari, 115-121
DOI: 10.33087/jiubj.v24i1.4160

Penyederhanaan Birokrasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

Siti Masitoh, Deden Hadi Kushendar, Aditia Mulawarman
STIA Bandung, Jl. Muararajeun No.51 Bandung
Correspondence: sitim.desima@gmail.com

Abstrak. Penyederhanaan birokrasi merupakan satu dari 5 (lima) fokus program utama Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo sebagai amanat presiden yang menjadi eksekutif order yang wajib dilakukan. Penyederhanaan birokrasi perlu dilakukan secara menyeluruh debfab dan investasi untuk menciptakan lapangan kerja harus diutamakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyederhanaan birokrasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat. Metode kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data dilakukakan melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah pada pelayanan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat sudah sesuai dan dalam penyelarasan jabatan administrasi ke jabatan fungsional karena penyederhanaan birokrasi memiliki kelebihan yaitu pelayanan menjadi lebih sederhana, lincah, cepat dan tidak bertele-tele Dispusipda Daerah Jawa Barat melakukan penyederhanaan birokrasi atas dasar kebijakan pemerintah dengan tujuan memudahkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat lebih cepat.

Kata kunci : birokrasi; dinas; kearsipan; penyederhanaan; perpustakaan

Abstract. *Simplification in the bureaucracy is one of the focuses of the 5 (five) priority programs of the Onward Indonesia Cabinet under the leadership of President Joko Widodo and Ma'ruf Amin and as a presidential mandate which is an executive order that must be carried out. We must continue to simplify the bureaucracy on a large scale. Investment for job creation must be prioritized. This study aims to determine the simplification of bureaucracy in the Regional Library and Archives Office of West Java Province. The method used in this study is qualitative by using data collection techniques by observing, interviewing and documenting. The results of this study are that the services available at the Regional Library and Archives Service of West Java Province are appropriate and in the alignment of administrative positions to functional positions because the simplification of the bureaucracy has the advantage that services become simpler, agile, fast and less verbose Regional Library and Archives Services West Java Province simplified the bureaucracy on the basis of government policy with the aim of facilitating the delivery of services to the community more quickly.*

Keywords *: archives; bureaucracy; library; service; simplification*

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi berupa penyederhanaan birokrasi telah menjadi komitmen pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah. Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi meliputi transformasi jabatan, manajemen kinerja, dan transformasi organisasi. Keadaan ini di tingkat daerah tentu saja akan menimbulkan berbagai permasalahan dan tantangan yang secepatnya harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah. Penyederhanaan birokrasi sendiri merupakan satu dari 5 (lima) konsentrasi prioritas program Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo juga menjadi ekdekutif order yang harus dilakukan sebagai mandat presiden. Penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran harus terus dilakukan, menciptakan lapangan pekerjaan harus diutamakan sebagai investasi (Bramantyo dan Mardjoeki, 2020).

Beberapa aturan harus ditetapkan menjadi landasan yuridis karena penting untuk pembenahan birokrasi saat ini secara operasional. Hal ini dapat dilihat dari terbitnya PermenPAN-RB No. 17/2021, PermenPAN-RB No. 25/2021, dan Surat Mendagri No. 800/3484/OTDA. Dari aspek kelembagaan yang merupakan tindak lanjut atas berbagai peraturan Pemerintah Pusat, terkait penyederhanaan birokrasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan cara membenahi struktur organisasi, dan penyederhanaan birokrasi, dan transformasi kelembagaan yang diharapkan dapat terwujudnya pelayanan publik yang prima. Banyak masyarakat yang mengeluh atas peningkatan kinerja organisasi maupun kualitas pelayanan publik yang ada selama ini, menjadi

tujuan dari kebijakan penyederhanaan birokrasi. Pelayanan publik yang ada saat ini dinilai cenderung birokratis dengan rentang garis komando yang begitu panjang yakni 3 (tiga) lapisan (layer) pada sebuah Badan maupun Dinas yang ada di daerah. Begitu juga dengan kinerja dari organisasi publik yang bahkan ada beberapa standar pelayanan minimal (SPM) yang tidak dicapai organisasi publik juga banyak dikeluhkan (Rusliandy, 2022).

Dispusipda Jawa Barat menjadi satu diantara pelayanan publik yang telah beberapa kali melakukan perubahan nama. Awal mula tanggal 23 Mei 1956 didirikan bernama Perpustakaan Negara berdasar pada SK Menteri pendidikan pengajaran dan kebudayaan No. 29103/S pada 19 provinsi saat itu. Dispusipda Jawa Barat memiliki tugas pokok pelaksanaan urusan pemerintah dibidang perpustakaan dan kearsipan dengan ruang lingkup pembinaan perpustakaan dan budaya gemar membaca, perpustakaan deposit dan pengembangan bahan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, kearsipan, pengelolaan arsip statis, serta arsip dinamis yang merupakan wewenang Provinsi. Disamping itu juga bertugas untuk dekonsentrasi hingga dibentuk Sekretariat dari Gubernur yang menjadi Wakil dari Pemerintah Pusat dalam melaksanakan tugas asistensi yang sesuai tugasnya. Ini juga merupakan dasar dari reformasi birokrasi yang berjalan di Jawa Barat dapat berbanding lurus dengan penyederhanaan struktur organisasi.

Penyederhanaan birokrasi yang diarahkan oleh Presiden dibagi 2 (dua) level eselon, yang menggantikan Jabatan Administrator (eselon III) begitu juga Pengawas (Eselon IV) diganti Jabatan Fungsional (JF) demi menghargai kompetensi. Penyederhanaan Birokrasi dilakukan dengan tetap konsen dan menyelasarkan segi Penyederhanaan Birokrasi yang berlaku menyeluruh pada skala Nasional yang diputuskan oleh KemenPAN-RB. Penyederhanaan birokrasi juga sekaligus untuk menghadapi lemahnya struktur birokrasi yang ada sekarang ini, dimana struktur birokrasi begitu padat yang menjadikan lambatnya pengambilan keputusan maupun kebijakan. Berdasar pada hal itu, peneliti mengambil riset mengenai Penyederhanaan Birokrasi pada Dispusipda.

Tinjauan Pustaka

Birokrasi menjadi satu diantara lembaga tertua administrasi dan pemerintahan. Sehingga birokrasi sama tuanya dengan administrasi dan juga peradaban manusia, dimana satu memajukan yang lainnya dan berhubungan erat antara pemerintahan dengan peradaban. Jauh sebelum lembaga administrasi dan pemerintahan, birokrasi berdasar pada peradaban kuno, secara tangguh melakukan perannya dalam penyelenggaraan kerajaan dan peradaban besar, seperti Cina, Persia, dan Romawi, melalui tradisi yang berkesinambungan. Ketertiban untuk berbagai peradaban dengan sistem administrasinya selama beberapa millennium, birokrasi ini berakar pada setiap lembaga besar atau organisasi yang terstruktur dengan fungsi, misi, dan proses serta dampak signifikan baik pada eksternal lingkungan maupun internal (Muhammad, 2018).

Birokrasi adalah konsep yang mempunyai tiga makna, pertama yaitu setiap organisasi masyarakat modern ditandai dengan berbagai karakter ideal misalnya dalam kesatuan komando dimana garis hirarki kewenangannya jelas, pembagian maupun spesialisasi kerja, dokumentasi kegiatan, sistem rekrutmen dan promosi berdasar pada merit system, serta perintah maupun peraturan tertulis digunakan dalam mengatur kinerja organisasi dan pemberian perintah. Makna kedua, yaitu setiap organisasi atau institusi dengan skala besar dengan strukturisasi fungsi, misi, dan proses kerja dimana secara keseluruhan mempunyai efek lingkungan baik eksternal maupun internalnya. Pada konteks tersebut, pemberian makna birokrasi semakin luas, tidak terbatas pada organisasi publik saja tetapi juga organisasi privat, ruang lingkupnya berbagai organisasi pemerintahan maupun dinasti atau kerajaan tidak hanya pada abad modern akan tetapi sejak zaman kuno. Pemerintahan dinasti peradaban misalnya Cina, Mesir, Babilionia sampai kepada kehalifahan Islam juga termasuk pada kajian birokrasi. Berbagai entitas itu juga termasuk sebab sebenarnya aspek ontologi birokrasi Weber juga lebih dulu ditemukan dalam aktifitas administrasi yang mereka lakuka pada skala yang berbeda-beda ukuran.

Makna birokrasi yang ketiga sebenarnya kurang dikenal pada kajian akademik, yaitu sering disebut kajian sosiologis dan politik dengan ruang lingkup kajian pada berbagai lembaga birokrat seperti militer atau kemanan publik maupun sawasta. Pada birokrasi ini adakalanya struktur dan fungsinya tidak dapat disamakan dengan birokrasi publik maupun swasta secara umum. Berbagai organisasi seperti

Central Intelligent Agency, Mossad, MI-6, Savak di era Pahlevi Iran, FBI, Badan Intelijen Negara, atau biro tentara sawasta bayaran seperti Blackwater di Amerika Serikat termasuk dalam kategori ini. Birokrasi seperti berbagai macam organisasi lain bersifat feksibel sesuai perkembangan lingkungan internal maupun eksternal. Ideal-typuhus birokrasi Weber tidak sepenuhnya pasti bisa diterapkan sendiri dalam realita karena adanya perbedaan karakteristik epistemologisnya (Farazmand, 2009).

Penyederhanaan birokrasi 2 (dua) level menjadi arahan Presiden Jokowi pada pidato tanggal 14 Juli tahun 2019 serta tanggal 20 Oktober tahun 2019 lalu yang pada dasarnya dilakukan penyederhanaan birokrasi pejabat eselon dimana terdapat pengalihan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Adanya penyederhanaan dari birokrasi ini sekaligus memberikan jawaban akan lemahnya struktur birokrasi yang ada saat ini. Birokrasi saat ini terlalu banyak yang membuat perlambatan pada pengambilan keputusan dan kebijakan yang membuat kemungkinan terjadinya miskoordinasi dan miskomunikasi semakin besar. Kinerja birokrasi juga semakin tidak luwes dan memakan banyak biaya. Tujuan penyederhanaan dari birokrasi ini demi peningkatan efektivitas dalam pemerintahan dan akselarasi pengambilan keputusan yang menjadikan birokrasi lebih agile, dinamis, juga profesional demi peningkatan efisiensi dan efektivitas guna menunjang pelayanan kepada publik. Terdapat 5 (lima) tahapan dalam percepatan penyederhanaan birokrasi yaitu; (1) mengidentifikasi jabatan administrasi di unit kerja yang memungkinkan maupun tidak untuk penyederhanaan, (2) memetakan pejabat pada jabatan administrasi yang terkena penyederhanaan dari birokrasi, (3) memetakan jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pejabat yang terkena penyederhanaan dari birokrasi, (4) menyelaraskan tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan pada jabatan administrasi dan (5) menyelaraskan kelas jabatan administrasi kepada jabatan fungsional (Bramantyo and Mardjoeki, 2020).

Berbagau hasil penelitian memberikan informasi mengenai profil birokrasi di Indonesia beserta permasalahan yang dihadapinya, diantaranya yaitu *governance and decentralization survery* dan *governance assessment survey*. Informasi yang diperoleh dari dari iset tersebut harus secepatnya diterjemahkan menjadi informasi kebijakan yang memberikan kemudahan akses para pemberi kebijakan. *Policy papers* dan *policy briefs* harus secepatnya dibuat sebagai masukan bagi pemberi kebijakan. Sejauh ini terdapat jarak yang begitu jauh diantara proses perolehan informasi dan pengambilan keputusan maupun kebijakan. Sehingga berbagai informasi yang penting dari hasil riset tidak termanfaatkan untuk proses pembuatan kebijakan. Komunikasi antara pihak yang terlibat dalam ranah penelitian dengan pembuatan kebijakan sangat perlu untuk didukung dan diberdayakan (Dwiyanto, 2015). Hupe dan Hill, (2007) bahwa akuntabilitas tingkat jalan birokrat pada dasarnya bersifat multipel, bukan hanya dipraktekkan secara vertikal hubungan. Tujuannya adalah untuk menghubungkan perspektif ini secara eksplisit dengan kontekstual konseptualisasi tata kelola yang langka, sambil mengidentifikasi beberapa harapan tentang hubungan khusus antara akuntabilitas di satu sisi dan keragaman pengaturan di sisi lain. Pertanyaan sentral dalam artikel ini adalah, mengingat sifat dari level jalan birokrasi dan pengaturan di mana birokrat tingkat jalanan melakukan pekerjaan mereka, apa bentuk hubungan di mana para birokrat tingkat jalanan ini berada bertanggung jawab ambil.

METODE

Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif digunakan dimana penelitian dengan pendekatan guna mempelajari hubungan tiap variabel. Variabel yang tersedia dapat dinilai dengan menggunakan suatu instrumen membuat data berupa kata-kata yang diperolah pada saat penelitian dapat dipakai untuk kemudian dianalisis (Creswell, 2014). Peneliti dalam kualitatif melakukan riset dengan menggambarkan berbagai masalah secara empiris ketika penelitian berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menggali data mengenai Penyederhanaan Birokrasi pada Dispusipda Jabar. Penelitian ini dilakukan di kantor Dispusipda Jabar yang berlokasi di Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4 Bandung. Waktu penelitian dilakukan selama selama bulan Januari 2023. Informan yang menjadi subjek penelitian adalah Pegawai pada Dispusipda Jabar dan beberapa perwakilan masyarakat yang menerima pelayanan publik. Untuk menganalisa data dalam penelitian dipakai teknik analisa model interaktif yang dapat menganalisis data kualitatif secara interaktif serta berjalan secara

berkesinambungan hingga tuntas dan mencapai data jenuh.

HASIL

Suksesnya penetapan kebijakan penyederhanaan birokrasi ini tertera pada pidato Presiden Jokowi yang mensyaratkan implementor di bawahnya harus mempunyai pengetahuan mengenai tugasnya. Adapun sasaran dan tujuan kebijakan penyederhanaan organisasi ini harus dapat ditrasnformasilan pada sistem pemerintahan di Indonesia yakni pada semua organisasi pemerintahan baik tingkat kementerian, lembaga termasuk pemerintahan daerah. KemenPAN-RB selaku penentu pendayagunaan aparatur menjadi contoh lembaga yang menerapkan penyederhanaan organisasi. Sasaran dan tujuan sebuah kebijakan tentang penyederhanaan organisasi yang ingin dicapai, harus dijelaskan secara langkah kongkrit yang dapat menjadi acuan pada penerapan kebijakan itu sendiri.

Sejumlah atusan secara operasional harus ditentukan menjadi landasan yuridis yang berguna untuk pembenahan birokrasi yang ada sekarang ini, ini dapat dilihat dari adanya PermenPAN-RB No. 17/2021 dan PermenPAN-RB No. 25/2021 serta surat edaran Mendagri No. 800/3484/OTDA. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penyederhanaan birokrasi dalam kelembagaan untuk menindaklanjuti beberapa peraturan yang diberikan oleh yaitu pembenahan transformasi kelembagaan, strukturisasi organisasi, dan penyederhanaan birokrasi yang diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang prima. Hal ini sesuai dengan topik penelitian yang diangkat yaitu mengenai penyederhanaan birokrasi pada Dinas Perpustakan dan Kearsipan di Provinsi Jawa Barat.

Analisis Kebijakan Transformasi Organisasi

Perubahan organisasi pemerintahan tercantum pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) 2005-2025 yang menjadi lanjutan rencana sebelumnya guna mencapai tujuan yang diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945. Begitu penting dan urgen bagi seluruh rakyat Indonesia dalam penataan kembali dimana berbagai langkah diantaranya bidang pengelolaan SDM, SDA, lingkungan hidup beserta dengan kelembagaannya menjadikan Indonesia mampu mengejar ketertinggalannya serta memiliki posisi yang setara dan berdaya saing tinggi dalam skala Internasional. Perubahan organisasi kaitannya penyederhanaan birokrasi masih tergantung pada aturan dalam PP 18/2016, dimana sebenarnya PP tersebut masih terdapat sejumlah kelemahan yaitu; pertama, tidak adanya kebebasan bagi setiap daerah dalam berinovasi membentuk organisasi. Struktur organisasi, perumpunan dan Nomenklatur telah terkunci pada PP dan Permen saat ini. Kedua, pembagian kerja dan spesialisasi diantara perangkat di daerah berdasar pada urusan pemerintahan yang berakibat hadirnya kesenjangan (gap) pada beban kerjanya (Rusliandy, 2022).

Penyederhanaan birokrasi yang dibagi 2 (dua) level eselon ini dilakukan dengan cara alih jabatan dari Administrator pada eselon III, Pengawas pada eselon IV, serta Pelaksana pada eselon V beralih pada Jabatan Fungsional diseluruh instansi pemerintah yang ada di pusat dan daerah. Jabatan fungsional begitu penting perannya dalam menunjang kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya pada eselon I dan JPT Pratama pada eselon I). Hal ini menjadi acuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi guna menunjang pelayanan kepada publik secara lebih mudah dan cepat karena pelayanan ditangani langsung yang bersangkutan.

Penyederhanaan atau Perampingan birokrasi dan penyetaraan jabatan instansi pemerintah ini khususnya bagi jabatan administrator dan pengawas telah lama menjadi wacana. Upaya ini bertujuan untuk mengalihkan fokus pegawai dari jabatan struktural menjadi fungsional. Harapan dari penyederhanaan ini agar dapat meminimalisir anggaran dalam menfasilitasi Dinas maupun jabatan eselon III dan IV (Rakhmawanto, 2021). Penyelenggaraan perubahan menyeluruh dari organisasi pada penyederhanaan dari birokrasi di pemerintah daerah pada tahun 2021 lalu terbatas pada perampingan jabatan eselon menjadi 2 lapisan (layer), hal ini menjadikan susunan organisasi perangkat di daerah tersebut menjadi kepala perangkat daerah yaitu Setda dengan para asisten atau Kadis dan Kaban, serta Setwan DPRD dan jabatan administrator yaitu Sekretaris atau Kabid atau Kabag di Setda dan Setwan DPRD, serta jabatan pengawas di sekretariat perangkat daerah seperti Kasubbag Program atau Kasubbag Kepegawaian atau Kasubbag selebihnya jabatan Umum dan Keuangan, serta pengawas sepert Kasi Kasubbid atau Kasubbag

ditiadakan dan diganti koordinator jabatan fungsional (Rusliandy, 2022).

Analisis Kebijakan Transformasi Jabatan

Penyederhanaan birokrasi dengan cara pengalihan jabatan menjadi sebuah cara positif dalam hal perbaikan kinerja birokrasi di Indonesia, akan tetapi perencanaannya harus disusun dengan matang serta tidak terburu-buru tidak dengan diiringi dengan konsep yang baik. Gagasan organisasi yang agile memberikan peluang untuk menyambut era normal baru (new normal) setelah pandemic Covid-19 serta masa mendatang yang erat kaitannya dengan ketidakpastian, perubahan, kompleks, dan ambigu (Sanatana, 2022). Kemen-PAN RB sendiri sudah mengeluarkan PermenPAN-RB No. 13/2019 mengenai Pembentukan dan Pengembangan Jabatan Fungsional ASN dengan tujuan guna mendukung penyederhanaan berbagai birokrasi yang sederhana yang diharapkan diharapkan tidak sebatas memberikan dampatk positif untuk masyarakat, akan tetapi juga untuk memudahkan proses perizinan seperti usaha maupun investasi terutama pemerintah di daerah (Marthalina, 2021).

Permasalahan yang ada pada proses alih jabatan dalam penyederhanaan dari birokrasi pemerintah di daerah dibagi menjadi; (1) pengelolaan jabatan fungsional yang kini belum mampu dilaksanakan dengan profesional, akibatnya belum dapat melahirkan figur jabatan fungsional yang berkualifikasi sesuai permintaan tupoksinya. Adanya instansi Pembina jabatan fungsional belum menerapkan pengelolaan secara profesional. (2) Berbagai jabatan fungsional pada berbagai Dinas maupun Badan tidak lengkap atau belum tersedia. Pejabat pengawas yang mengambil jabatan fungsional jika salah memilih, akhirnya akan sulit dalam pengumpulan poin kredit bagi pengembangan kariernya. (3) Manajemen maupun Pembinaan Jabatan Fungsional tidak menyeluruh, bahkan cenderung mengabaikan. Instansi Pembina seperti Kementerian atau Lembaga juga tidak secara menyeluruh fokus dan profesional melaksanakan pembinaan dan manajemen jabatan fungsional. (4) Pengelolaan kinerja jabatan fungsional pada unit merupakan sebuah inti dari penggunaan jabatan fungsional pada organisasi. Diperlukan adanya tambahan item spesialisasi kegiatan untuk yang diberikan tugas tambahan selaku koordinator sehingga dapat dihitung untuk mendapat poin kredit. (5) Dalam memilih alih jabatan dari pengawas ke jabatan fungsional tidak ketat seperti rekrutmen jabatan fungsional reguler, hal ini menjadikan transformasi jabatan menjadi abai terhadap SKM bagi yang akan alih fungsi ke fungsional.

Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi pada Dispusipda Jabar dimana penugasan jabatan fungsional yang ditempati pejabat yang terkena dampak penyederhanaan yaitu Subbag yang dapat menjadi ahli muda berasal dari Kabag yang menjadi ahli madya serta untuk memetakan jabatan administrasi tetap ada pejabat administrasi akan tetapi ditingkat Subbag menjadi dihilangkan dari kepala bidangnya dan langsung dialihkan ke fungsional melalui proses yang relatif pendek.

Analisis Kebijakan Transformasi Mekanisme Kerja

Penyesuaian cara kerja yang lebih lincah dan dinamis ditunjang dengan manajemen kinerja ASN yang optimal. Sebagai acuan dalam melaksanakan sistem kerja dan manajemen ASN, dikeluarkan PermenPAN-RB No. 7/2022 mengenai Sistem Kerja Instansi Pemerintah guna Penyederhanaan Birokrasi yang dilengkapi dengan PermanPAN-RB No. 6/2022 mengenai Manajemen Kinerja ASN. Melalui penetapan 2 (dua) kebijakan terbaru ini, seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah, seharusnya dapat adaptasi dengan sistem kerja melalui optimalisasi cara kerja maupun proses birokrasi yang fokus pada akselarasi perbaikan pelayanan pada publik dan pengambilan keputusan. Dengan sistem kerja yang baru ini, memungkinkan pejabat fungsional bertugas dengan cara changeable, flexible, dan moveable melalui manajemen kinerja yang akuntabel. Dalam mendukung meningkatnya kinerja yang diharapkan, perlu adanya peningkatan dialog kinerja dan umpan balik yang berkelanjutan (*ongoing feedback*).

Selain itu, dikembangkannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *Electronic Government* (e-Gov) pada instansi pemerintah menjadi permintaan yang wajib terpenuhi sebagai upaya membuat sarana informasi maupun birokrasi yang bersifat global dan transparan terhadap publik, dimana tertuang pada Perpres No. 95/2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Bila dicermati dasar kebijakan pengembangan e-Government ini, bisa kita lihat berbagai fokus yang utama mengenai pengembangan E-Gov ini, yakni; (1) Penataan beberapa sisi kehidupan

bangsa dan negara, ini berhubungan pada transformasi di masyarakat internasional menuju era informasi terbuka lewat sarana elektronik. Pemerintah dituntut dapat memberi layanan akan informasi secara menyeluruh bagi masyarakat serta pemberi kebijakan yang pas yang mampu meminimalisir mismunikasi antar komponen dalam berbangsa dan bernegara, (2) Permintaan dari masyarakat tentang pelayanan publik yang mampu dipercaya, fleksibel, handal, dan dapat dijangkau dengan mudah serta kemauan dari masyarakat sebagai aspirasi yang dapat didengar dan sampai pada pemerintah, (3) Meningkatkan kerjasama maupun hubungan antara pemerintah-swasta guna terbentuknya kemitraan berbagai dunia usaha (*public-private partnership*) secara transparan, (4) Memanfaatkan kemajuan IT dalam peningkatan kompetensi serta manajemen organisasi pemerintah yang semakin baik lagi (Bambang, 2021).

Hal ini memberikan perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan, dimana revolusi dari IT telah berpengaruh pada perubahan pengelolaan penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Manfaat IT berupa e-government, e-learning, e-procurement, cyber law, dan e-commerce, akan melahirkan pelayanan kepada publik yang semakin baik, lebih murah, lebih transparan, dan lebih cepat. Beberapa kondisi yang sering terjadi pada kelembagaan pemerintah termasuk pada Dispusipda yaitu masih terdapat kekurangan yang berasal dari strukturisasi organisasi yang ada saat ini harus mempertimbangkan orang yang menguasai teknologi.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa penyederhanaan atau perampingan birokrasi dibagi 2 (dua) level eselon yang dilakukan dengan cara alih jabatan dari Administrator pada eselon III, Pengawas padaa eselon IV, dan Pelaksana pada eselon V beralih pada Jabatan Fungsional di seluruh instansi pemerintah dimana hal ini menjadi acuan Dispusipda Jabar dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi guna menunjang pelayanan kepada publik dengan cara yang semakin cepat dan mudah sebab pelayanan ditangani langsung. Dalam Analisis Kebijakan Transformasi Jabatan yang ada pada Dispusipda Jabar dimana penempatan jabatan fungsional dapat ditempati oleh pejabat yang tidak terkena dampak peramingan diantaranya Subbag yang dapat diisi oleh ahli muda dimana berasal dari Kabag yang menjadi ahli madya dan untuk memetakan jabatan administrasi tetap ada namun ditingkat Subbag menjadi dihilangkan sehingga dari kepala bidangnya langsung ke fungsional dengan proses yang sederhana. Selanjutnya pada Transformasi Mekanisme Kerja, dikembangkan sistem kerja berbasis digital yang juga menjadi upaya Dispusipda Jabar yang memprioritaska SDM yang lebih kompeten dalam Teknologi informasi dengan harapan akan memperbaiki generasi untuk Indonesia Yang lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang, S. 2021, Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Untuk Mewujudkan Satu Data Vaksin COVID-19, Cimahikota.go.id.

Bramantyo, A. dan Mardjoeki, 2020, Urgensi Penyederhanaan Birokrasi dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi.

Creswell, J.W. 2014, *Research Design : Qualitatives Quantitatvives And Mixed Method Approaches*. 4th edn. Marina View: Sage Publication.

Dwiyanto, A. 2015, *Reformasi Birokrasi Kontekstual*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Farazmand, A. 2009, *Bureaucracy and Administration*. Boca Raton: CRC Press.

Hupe, P. and Hill, M. 2007, Street-Level Bureaucracy And Public Accountability, *Public Administration*, 85(2), 279–299.

Marthalina, M. 2021, Analisis Dampak Pengembangan Karir PNS Pasca Pelaksanaan Alih Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional, *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 9(1), 42–55.

Muhammad, 2018, *Birokrasi (Kajian Konsep, Teori menuju Good Governance)*. 1st edn. Edited by B. Rahman, R. Kurniawan, and H. Iskandar. Lhokseumawe: Unimal Press.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

Rakhmawanto, A. 2021, Perampingan Birokrasi, *Civil Service Journal*, 15(2), 19–32.

Rusliandy, 2022, Analisis Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah, *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 53–70.

Sanatana, I.M.M. 2022, Kebijakan Transformasi Jabatan dan Urgensinya pada Pemerintah Provinsi Bali, *Jurnal Bali Membangun Bali*, 3(1), 1–14.